

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditargetkan Beroperasi Juni 2023

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mulai beroperasi pada Juni 2023 tahun depan.

"Peluncuran nanti untuk operasional insya Allah nanti kurang lebih di bulan Juni 2023," kata Jokowi sesuai meninjau proyek kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Bandung, Kamis (13/10).

Jokowi menyebutkan, hingga hari ini, progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8 persen. Ia menuturkan, kendala sempat terjadi saat membangun terowongan untuk proyek ini akibat kondisi tanah tetapi hal itu sudah teratasi.

"Saya tadi mendapatkan keterangan bahwa progresnya sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan," kata Jokowi.

Kepala Negara berharap, setelah beroperasi kelak, Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mempercepat dan meningkatkan mobilitas orang maupun barang.

"Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat, kemudian ada titik-titik pertumbu-

han ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian di Kabupaten Bandung juga terjadi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kesiapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal diuji coba pada November 2022. Rencananya uji dinamis akan dilakukan bersamaan dengan peninjauan Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping ke proyek itu.

"Ya bisa (diuji coba oleh Jokowi dan Xi Jinping), masak enggak bisa," ujarnya saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/10).

Menurut Luhut, progres pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan dengan baik, sehingga diyakini uji dinamis yang rencananya dilakukan pada 16 November 2022 dapat dilaksanakan.

"Bagus (progresnya), bahkan harusnya saya hari ini pergi meninjau persiapan dynamic test-nya, karena dynamic test itu harus terjadi tanggal 16 November," kata Luhut. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANT



PUNCAK GERNAS BBI MALUKU UTARA 2022

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (kedua kanan) bersama Executive General Manager Regional Papua Maluku PT Pertamina Patra Niaga I Ketut Permadei (kedua kiri), Sekda Provinsi Maluku Utara Samuddin A Kadir (kiri) melakukan belanja secara langsung saat puncak Gernas BBI Maluku Utara di Benteng Oranye, Ternate, Maluku Utara, Kamis (13/10). Puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Maluku Utara Tahun 2022 tersebut diselenggarakan dari tanggal 13 - 16 Oktober 2022 dengan diikuti 16 top brand, 17 UMKM dan BUMDes pilihan.

PDI-P Usulkan Pemilihan Legislatif Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

Wacana Pemilihan Legislatif agar dikembalikan ke sistem proporsional tertutup kembali mencuat. Puskapol UI mengkritik gagasan tersebut karena Parpol di Indonesia dinilai belum ideal.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya mengusulkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional tertutup. Hasto menyatakan hal itu di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara focus group discussion yang diselenggarakan PDI-P bertema Reformasi Sistem Hukum, Kamis (13/10).

"Instrumennya, Prof. Mahfud, yang kita sempurnakan. Misalnya, seluruh calon-calon anggota legislatif yang bisa dicalonkan oleh partai politik yang dinyatakan reliable," kata Hasto dalam

acara yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10).

Oleh karena itu, para calon anggota legislatif itu harus dibidik terlebih dulu di kelembagaan nasional, misalnya di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sehingga negara menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parlementary threshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita. Sehingga disiapkan, kasih rapornya di situ," jelas Hasto.

Kendati demikian, Hasto menegaskan, kewenangan

memutuskan calon anggota legislatif layak maju, tetap pada partai politik. Negara, kata Hasto, hanya membantu menyiapkan kaderisasi bagi calon-calon tersebut.

Mendengar hal itu, Mahfud menyatakan mendukung usulan PDI-P tersebut.

"Saya ingin tambahkan dukungan dulu kepada PDIP salah satunya agar pemilu itu kembali ke sistem proporsional tertutup," kata Mahfud.

"Kalau dikembalikan tertutup itu bagus. Diubah saja," katanya.

Sebelumnya, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia mengkritik ide mengubah sistem pemilihan legislatif (pileg) Indonesia, dari sistem proporsional terbuka seperti saat ini menjadi sistem proporsional tertutup.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos caleg pilihannya untuk duduk di parlemen. Sementara itu, dalam sistem tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik, untuk berikutnya partai

yang memilihkan kadernya untuk duduk di parlemen.

Direktur Eksekutif Puskapol UI Hurriyah mengungkap, sistem pileg proporsional tertutup baru layak diterapkan di Indonesia seandainya negara ini sudah memiliki sistem partai politik yang sehat.

"Masalahnya, partai politik yang mestinya jadi instrumen utama demokrasi di Indonesia, justru saat ini dia menjadi lembaga paling tidak demokratis," kata Hurriyah kepada, Jumat (23/9) lalu.

Hurriyah memberi contoh, dengan sistem terbuka saja, tak sedikit partai politik yang masih mencoba mencari celah

untuk memegang kendali dalam pencalonan anggota legislatif-kader-kader yang "disukai" pimpinan dan memiliki privilege lah yang dapat melenggang mulus ke parlemen.

Dengan sistem tertutup, maka partai politik bakal memegang kendali penuh untuk menetapkan kader yang duduk di parlemen. Dengan sistem kebanyakan partai politik di Indonesia yang feodal, hal ini jelas dikhawatirkan sebagai gejala kemunduran demokrasi.

"Apakah kemunduran demokrasi, iya, di dalam konteks saat ini sangat berpotensi memundurkan demokrasi," ujar Hurriyah. ● han

KPK Setor Denda Rp1,2 Miliar dari Anas Urbaningrum dan PT Nindya Karya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang denda sejumlah Rp1,2 miliar ke kas negara dari mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya.

"Jaksa eksekusi Hendra Apriansyah melalui biro keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara berupa pembayaran uang denda sebesar Rp1,2 miliar," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Kamis (13/10).

"Denda tersebut berasal dari pembayaran dua terpidana, Anas Urbaningrum sebesar Rp300 juta dan PT Nindya Karya sebesar Rp900 juta," ujarnya.

Sekadar informasi, Anas Urbaningrum merupakan terpidana perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012. Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi tiga bulan kurungan. Anas juga diwajibkan

membayar uang pengganti sejumlah Rp57.592.330.580 dan 5.261.070 dolar AS dengan ketentuan apabila belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sedangkan, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sementara, PT Nindya Karya merupakan terpidana korporasi terkait korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang tahun anggaran 2004-2011. PT Nindya Karya dihukum untuk membayar denda Rp900 juta serta uang pengganti sebesar Rp44.681.053.100 (Rp44,6 miliar).

"Untuk perkara-perkara lainnya, KPK optimalkan mekanisme penagihan uang denda dan uang pengganti pada para terpidana korupsi untuk memaksimalkan tercapainya asset recovery," ujar Ali. ● han

KPK Periksa Asisten Hakim Agung, Dalam Proses Pengajuan Perkara di MA

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengajuan perkara dalam upaya hukum di Mahkamah Agung (MA) kepada Asisten Hakim Agung, Prasetyo Nugroho.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Prasetyo diperiksa sebagai saksi untuk perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, kemarin.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengajuan perkara pada tingkat upaya hukum di MA," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/10).

Pada agenda tersebut KPK juga memeriksa karyawan swasta bernama Redhy Novariza. Penyidik mendalami materi yang sama terhadap Redhy. Selain meminta keterangan, KPK juga melakukan penitipan terhadap dokumen yang diduga terkait dengan suap pengurusan kasasi gugatan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dari OTT tersebut KPK mengamankan yang senilai 205.000 dolar Singapura. Adapun Sudrajad Dimiyati diduga mendapatkan jatah Rp 800 juta. ● me



FOTO: ANT

WAWANCARA KHUSUS MENTERI LUAR NEGERI RETNO MARSUDI

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi (kiri) menjawab pertanyaan pembawa acara Podcast Antara Rully Yulardi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (13/10). Dalam kesempatan tersebut Menteri Retno memberikan penjelasan terkait perkembangan persiapan dan isu-isu prioritas dalam KTT G20, serta isu-isu multilateral dan regional terkini.

KPK Siap Buktikan Aliran Korupsi Rp17,7 Miliar untuk Mantan KSAU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi bukti adanya aliran dana komando sebesar Rp17,7 miliar terkait pengadaan atau pembelian Helikopter AW-101 di TNI AU untuk mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Agus Supriatna. Bukti-bukti itu pun akan disampaikan di persidangan.

"Surat dakwaan tim jaksa KPK disusun berdasarkan hasil penyidikan yang sah dan akan dibuktikan di persidangan secara terbuka," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (13/10).

KPK, kata Ali, mengantongi banyak bukti terkait perkara tersebut saat proses penyidikan Irfan Kurnia Saleh, termasuk soal adanya aliran uang ke sejumlah pihak.

"KPK yakin dengan kecukupan alat bukti yang kami peroleh selama proses penyidikan perkara tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menyebut bahwa mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Agus Supriatna telah menerima dana komando sebesar Rp17.733.600.000 (Rp17,7 miliar) dari Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Dana komando sebesar Rp17,7 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan helikopter angkut jenis AW-101 di TNI-AU tahun 2015-2016. Demikian diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/10) lalu.

"Terdakwa memberikan uang sebesar Rp17.733.600.000 sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk Agus Supriatna selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) dan Kuasa Penguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015 sampai Januari 2017, Agus Supriatna; Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisada AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode tahun 2015 sampai dengan 20 Juni 2016, Heribertus HENDI Haryoko.

Selanjutnya, Kadisada AU sekaligus PPK periode 20 Juni 2016 sampai 2 Februari 2017, Fachri Adamy; Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI-AU periode tahun 2015 sampai Februari 2017, Supriyanto Basuki; serta Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI-AU, Wisnu Wicaksono. ● han

LPSK Sebut 32 CCTV Stadion Kanjuruhan Berfungsi dengan Baik saat Tragedi Terjadi

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan setidaknya ada 32 Closed Circuit Television (CCTV) di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution mengatakan, sebanyak 32 CCTV itu berfungsi ketika terjadinya tragedi Kanjuruhan.

"LPSK menemukan ada 32 CCTV, di 32 titik dan semuanya dalam pantauan LPSK memang relatif berfungsi," ujar Manajer dalam konferensi pers daring, Kamis (13/10).

Hanya saja, Manajer tak memaparkan mengenai isi rekaman CCTV yang telah dipantau oleh LPSK. Di sisi lain, Manajer juga menyoroti mengenai kapasitas Stadion Kanjuruhan.

Sebagai informasi, kapasitas Stadion Kanjuruhan bisa menampung 38.054 penonton. Jumlah ini terdiri dari 602 penonton di bangku VIP, 2.804 penonton di tribun VIP, dan 19.720 di tribun ekonomi. Sehingga, total terdapat 23.126

bangku penonton.

"Sementara kapasitas tempat untuk berdiri bisa 14.920 orang, jadi totalnya bisa 38.054 orang," katanya.

Selain itu, Manajer mengatakan bahwa Stadion Kanjuruhan mempunyai 14 tribun dan 14 pintu keluar. Khusus di tribun kelas ekonomi, kata dia, setidaknya ada enam pintu gerbang. Dari segi ukuran, pintu gerbang A mempunyai lebar 5,8 meter, pintu gerbang B dengan lebar 5,8 meter, pintu gerbang C dengan lebar 8,5 meter, pintu gerbang E dengan lebar 4,7 meter, serta pintu gerbang F dengan lebar 4,7 meter.

"Di stadion ini juga terdapat dua pintu lainnya untuk kendaraan ambulans dan petugas," terangnya.

Diketahui, laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10) malam, berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Sesuai laga, keriuhan pun pecah. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah penonton yang berada di

tribune stadion. Sebanyak 132 orang yang berada di dalam stadion meninggal dunia.

Merespons tragedi Kanjuruhan, pemerintah telah membentuk TGIFP Tragedi Kanjuruhan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Polri telah menetapkan enam orang tersangka dalam tragedi Kanjuruhan.

Keenamnya yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Pannel Arema FC AH, Security Officer SS, Kabag Operasi Polres Malang WSS, Danki III Brimob Polda Jawa Timur H, dan Kasat Samapta Polres Malang BSA.

Para tersangka dijerat Pasal 359 dan 360 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dan Pasal 103 Juncto Pasal 52 UU RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selain itu, ada 20 polisi yang melanggar etik yang terdiri atas 6 personel Polres Malang dan 14 personel dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur. ● me

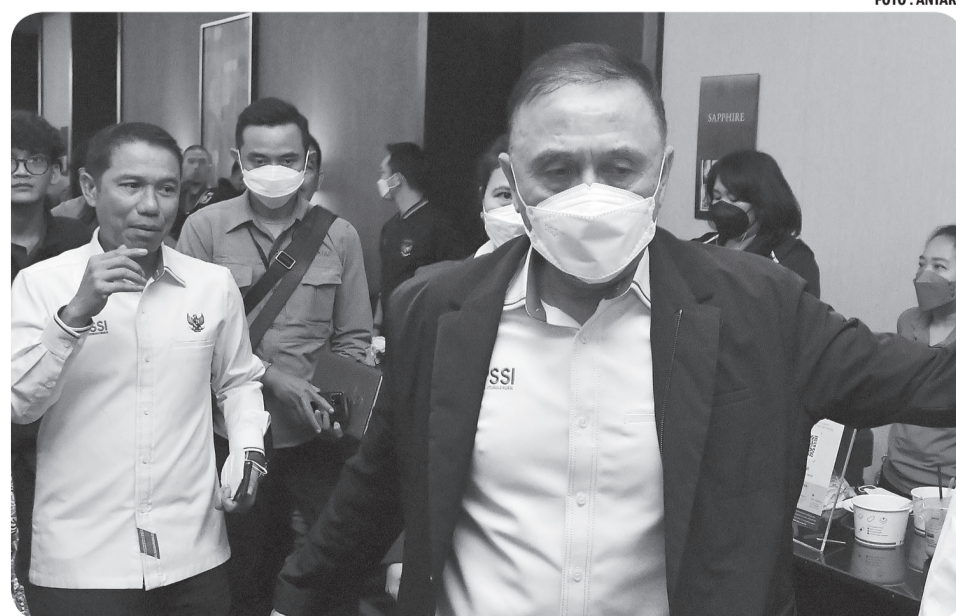


FOTO: ANTARA

PSSI MEMBENTUK TIM SATUAN TUGAS TRANSFORMASI SEPAK BOLA Ketua PSSI Mochamad Iriawan (kanan) bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi (kiri) usai pertemuan dengan AFC dan FIFA di Jakarta Pusat, Kamis (13/10). Pada pertemuan tersebut PSSI membentuk tim task force atau satuan tugas (satgas) Tranformasi sepak bola Indonesia bersama FIFA, AFC, Kemenpora, Kemenkes, POLRI, dan Kementerian PUPR.